



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 26 November 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

1. 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
2. 24 (Dua Puluh Empat) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur.

KETIGA : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun Eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 52 Tahun 2020
TANGGAL : 26 November 2020

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
T A H U N 2 0 2 1

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
1	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan alokasi program dan penganggaran Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020	√	-	2021	-	√	TAPD	Triwulan I	
2	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Perubahan alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2021	√	-	2021	-	√	TAPD	Triwulan III	
3	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2022	√	-	2022	-	√	TAPD	Triwulan IV	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6	-	7	8	9	10
4	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022	1. Perubahan dilakukan sehubungan dengan bencana pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap perlambatan perekonomian sekaligus kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2. Tindak lanjut Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yakni perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yaitu bencana, krisis ekonomi atau perubahan kebijakan nasional	-	√	2021	-	√	Bappeda, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Triwulan I	
5	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah 2030	Mengatur tata ruang wilayah provinsi yang memuat perencanaan (struktur dan pola ruang), pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daratan	-	√	2021	√	-	Bappeda, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Triwulan I	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
6	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	a. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, terdiri dari Tujuan penataan ruang kecamatan, rencana pola ruang, zona fungsi lindung, zona fungsi budi daya, zona perairan dan pesisir laut, rencana jaringan prasarana, pergerakan, energi, telekomunikasi, drainase, air limbah, sampah, jalur dan ruang evakuasi bencana, rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya b. Peraturan Zonasi terdiri dari: ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, teknik pengaturan zonasi, prasarana minimal, standar teknis, ketentuan khusus, dan dampak	-	✓	2021	✓	-	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Bappeda, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Triwulan I	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
7	Peraturan Daerah	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019-2039	Pengaturan struktur, pola tata ruang, peruntukan ruang laut (Kepulauan Seribu) yang merupakan dasar hukum dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	√	-	2021	√	-	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Bappeda, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Triwulan I	
8	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)	Penambahan ketentuan pembentukan badan usaha untuk menerima dan mengelola <i>Participating Interest</i> 10 % (sepuluh persen) penambahan modal berupa imbreng tanah di kawasan olah raga terpadu	-	√	2021	-	√	BPBUMD, Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I	
9	Peraturan Daerah	Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya	Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, mengatur modal dasar, ruang lingkup kegiatan BUMD	√	-	2021	√	-	BPBUMD, Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I	
10	Peraturan Daerah	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, mengatur modal dasar, ruang lingkup kegiatan BUMD	√	-	2021	√	-	BPBUMD, Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
11	Peraturan Daerah	Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, mengatur modal dasar, ruang lingkup kegiatan BUMD	√	-	2021	√	-	BPBUMD, Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I	
12	Peraturan Daerah	Perseroan Terbatas Jakarta Tourindo (Perseroan Daerah)	Perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Daerah, mengatur modal dasar, ruang lingkup kegiatan BUMD	√	-	2021	√	-	BPBUMD, Biro Perencanaan dan Keuangan	Triwulan I	
13	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan	Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan sebagai pemenuhan standar pelayanan minimal berupa persyaratan dan tata cara perijinan, jaminan ketersediaan daya tampung tiap jenjang pendidikan, pemerataan pendidikan antar wilayah melalui Zona Layanan Satuan Pendidikan (ZLSP), pencapaian standar layanan mutu pendidikan (mutu pendidikan, akreditasi, peningkatan kualitas guru), pembiayaan (pemberian subsidi bagi siswa yang tidak mampu baik di sekolah negeri ataupun swasta, pemungutan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga yang mampu di sekolah negeri	√	-	2021	√	-	Dinas Pendidikan, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Triwulan I	Prakarsa DPRD

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
14	Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengelolaan BMD yang dipisahkan, pembinaan pengendalian dan pengawasan, sengketa barang milik daerah dan ganti rugi	√	-	2021	√	-	Badan Pengelola Aset Daerah	Triwulan I	
15	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Menyesuaikan dengan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga dilakukan perubahan terhadap Pasal 5 ayat (3) terkait penentuan dasar pengenaan apabila nilai perolehan objek pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan	-	√	2021	-	√	Badan Pendapatan Daerah	Triwulan II	
16	Peraturan Daerah	Jalan Berbayar Elektronik	Tarif layanan, pembangunan sarana Jalan berbayar elektronik, teknologi jalan berbayar elektronik, mekanisme sistem berbayar elektronik, pengawasan dan pengendalian	√	-	2021	√	-	Dinas Perhubungan	Triwulan II	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
17	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Perencanaan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, industri hijau, berbasis teknologi informasi (digital) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun mendatang	√	-	2021	√	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Biro Perekonomian dan Keuangan	Triwulan II	
18	Peraturan Daerah	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengaturan tentang sasaran, hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan SPALD, baku mutu, kerja sama dan kemitraan, data dan informasi, perizinan, tarif, pengembangan teknologi PALD, penanggulangan tanggap darurat, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, larangan, sanksi dan penyidikan	√	-	2021	√	-	Dinas Sumber Daya Air, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Triwulan II	
19	Peraturan Daerah	Jaringan Utilitas	Pengaturan penataan ruang melalui prioritas sarana jaringan utilitas terpadu	√	-	2021	√	-	Dinas Bina Marga	Triwulan II	
20	Peraturan Daerah	Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan kawasan tanpa rokok, hak dan kewajiban, penandaan, pembinaan dan pengawasan, peran masyarakat dan sanksi	√	-	2021	√	-	Dinas Kesehatan, Biro Kesejahteraan Sosial	Triwulan II	Prakarsa DPRD

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
21	Peraturan Daerah	Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, penambahan 17 sektor penting dalam aspek kehidupan bagi penyandang disabilitas, pembentukan kelembagaan Dewan Disabilitas Jakarta, bentuk dan prosedur pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	-	√	2021	√	-	Dinas Sosial, Biro Kesejahteraan Sosial	Triwulan III	
22	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Informasi Kependudukan dan Pengendalian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	√	-	2021	√	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Triwulan III	
23	Peraturan Daerah	Rumah Susun Milik	Pembinaan, Perencanaan, Pembangunan, Penguasaan pemilikan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Peningkatan Kualitas, Pengendalian, Kelembagaan, Tugas dan wewenang, Hak dan Kewajiban, Pendanaan/sistem pembiayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Rumah Susun Milik	√	-	2021	√	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan III	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6	-	7	8	9	10
24	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan	Penyesuaian dan perubahan mengenai masa bakti pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan, ketentuan masa jabatan, larangan bagi pengurus serta lokasi/ tempat sekretariat	-	√	2021	-	√	Biro Pemerintahan	Triwulan III	
25	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Pangan	Menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan aman, menjamin stabilitas ketersediaan pangan pokok dan strategis/ penting, memastikan kelancaran logistik dan distribusi pangan, menciptakan kondisi kondusif bagi usaha dalam alur sistem pangan/ rantai pasok agribisnis pangan, kemudahan akses bagi kelompok rawan/ rentan pangan dan gizi, mendorong terpenuhinya kecukupan gizi perseorangan/ masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, dan pengaturan tentang dana abadi pangan beserta pengelola dana abadi pangan	√	-	2021	√	-	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Triwulan IV	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETTERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
26	Peraturan Daerah	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengaturan pengelolaan keuangan daerah, APBD, Penyusunan rancangan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan laporan, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, Kekayaan Daerah dan Hutang Daerah, BLUD, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan	-	✓	2021	✓	-	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Triwulan IV	
27	Peraturan Daerah	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i> / CSR)	Pengaturan ruang lingkup dan asas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maksud dan tujuan, prinsip dan pedoman, program TJSLP/CSR, kelembagaan, pembiayaan, penghargaan dan sanksi	✓	-	2021	✓	-	Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Biro Kesejahteraan Sosial	Triwulan IV	Prakarsa DPRD
28	Peraturan Daerah	Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, tugas dan fungsi, pemilihan pengurus dan pemberdayaan masyarakat	✓	-	2021	✓	-	Biro Pemerintahan	Triwulan IV	Prakarsa DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH